

# EKONOMI AGRARIS DAN MARITIM DALAM DIVERSIVIKASI DAN DISENTRALISASI

Oleh  
Dra. Ratna Manullang

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam meningkatkan pendapatan nasional dan sebelum terjadi krisis moneter tahun 1977 yang lalu telah berada dalam kelompok negara-negara berpendapatan menengah. Sejak akhir tahun 1960 an hingga tahun 1996, tingkat pendapatan nasional Indonesia meningkat cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 1969 tingkat pendapatan rata-rata per kapita hanya sekitar US \$ 100, tetapi pada tahun 1996 sudah mencapai US\$ 1.039 dengan laju pertumbuhan selama tahun 1960 an mencapai rata-rata sekitar 60% pertahun, dan mencapai rata-rata 7,82% pada tahun 1996. Keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian khususnya sektor-sektor lain pada umumnya, namun demikian, keberhasilan tersebut tidak dapat berlanjut terus dengan adanya krisis moneter dan krisis ekonomi pada tahun terakhir ini.

Meskipun di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat cukup baik namun dilain pihak pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata diseluruh wilayah Indonesia. Memasuki era pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke II (PJP dua) pemerintah mengelompokkan daerah-daerah di Indonesia menjadi kelompok besar yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pengelompokan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Propinsi-propinsi yang berada di KBI, yaitu propinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa dan Bali, relatif maju pembangunan ekonominya. PDRB selama PJP I yang tercipta di KTI sekitar 17%. Penyebaran sumber daya alam dan penduduk Indonesia juga tidak merata, KBI dengan luas daratan hanya 32 persen dari luas daratan Indonesia menampung sekitar 82 persen dari penduduk Indonesia. Sedangkan KTI yang luas daratannya 68 persen hanya menampung penduduk sekitar 18 persen seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Indikator Pokok di KBI dan KTI

Indikator	KBI (%)	KTI (%)	Jumlah (%)
Luas Daratan	32	68	100
Jumlah Penduduk			
Tahun 1975	83,1	16,9	100
Tahun 1980	82,6	17,4	100
Tahun 1990	81,9	18,1	100
Tahun 1995	81,4	18,6	100
Kepadatan Penduduk	258	28	
PDRB			
Tahun 1975	63,9	36,1	100
Tahun 1980	61,5	38,5	100
Tahun 1985	62,4	37,6	100
Tahun 1992	63,2	36,8	100
Tahun 1995	62,8	37,2	100

Sumber : Data Dan Berbagai Statistik Indonesia dan Publikasi BPS

Penyebab ketidak-meratanya pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain disebabkan adanya perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Menurut Perraoux (1977), pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada saat yang bersamaan, akan tetapi terjadi pada beberapa tempat atau pusat pertumbuhan/pengembangan (growth poles) dengan intensitas yang berbeda. Sehingga daerah yang akan tumbuh dengan cepat adalah daerah yang merupakan pusat pertumbuhan/pengembangan, sedangkan daerah lainnya akan tetap jauh tertinggal dalam segala bidang. Myrdal (1977) mengatakan bahwa tempat-tempat yang akan menarik adalah tempat-tempat yang memiliki kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pusat kegiatan perekonomian, sehingga daerah ini memiliki keuntungan komparatif (*comparative advantage*) dibanding dengan daerah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan akan terjadi hanyalah pada daerah yang mempunyai keuntungan komparatif baik dari segi sumberdaya alam, modal maupun sumberdaya manusia.

Ditinjau dari keuntungan komparatif dari segi sumberdaya alam, Indonesia mempunyai potensi sumber daya lahan serta sumber daya pantai dan lautan (maritim) yang sangat besar. Luas Wilayah daratan atau lahan Indonesia sekitar 1,92 juta Km<sup>2</sup>. Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut teritorial sebesar 0,3 juta km<sup>2</sup>, laut Nusantara sebesar 2,8 juta km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebesar 2,7 juta km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke sepanjang 80.790 km atau sekitar 14 persen panjang garis pantai dunia dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas laut sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut diperkirakan memiliki potensi lestari sumber daya hayati (*maximum sustainable yield.MSY*) perikanan laut sebesar 6,7 juta ton per tahun.

Sebesar 4,4 juta ton per tahun berasal dari perairan Nusantara dan 2,3 juta ton per tahun berasal dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari jumlah potensi tersebut diperkirakan 32 persen telah dieksploitasi.

## II. Sumberdaya Lahan dan Maritim Serta Pemanfaatannya

Sumber lahan dan lautan (maritim) disamping sebagai penyedia pangan dan protein hewani, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat petani dan nelayan juga dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor hasil pertanian, mineral dan energi jumlah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan (minyak dan gas, perikanan laut, transportasi dan lain-lain) misalnya, diperkirakan mencapai 22 persen dari PDB dan menyerap 13,6 juta tenaga kerja.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan sumberdaya maritim, berdasarkan Data Statistik Perikanan 1993, dalam periode tahun 1989-1993 perkembangan volume ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24,1 persen per tahun, yaitu dari 228.590 ton pada tahun 1989 menjadi 529213 ton pada tahun 1993. Sedangkan nilainya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,6 persen per tahun, yaitu dari US\$ 825,125 juta menjadi US\$ 1.503,748 juta. Pada tahun 1993 jumlah ikan yang dipasarkan di dalam negeri dan untuk pasar ekspor masih didominasi dalam bentuk segar 51,9 persen. Sisanya diolah dalam bentuk pengolahan tradisional 41 persen, 1,2 persen, pembekuan 6,2 persen dan penepungan 0,5 persen.

Meskipun volume dan nilai ekspor sumberdaya kelautan (maritim) menunjukkan kenaikan, namun potensi sumberdaya kelautan masih belum banyak dimanfaatkan. Setelah PJP ternyata masih terdapat sekitar tiga juta nelayan kecil dengan mayoritas usaha tangkapan kurang lebih 5 juta ton ikan per tahun. Demikian juga teknologi yang digunakan, selama hampir tiga dasawarsa sebagian besar tidak banyak berubah.

Potensi terbesar sumberdaya pantai dan lautan Indonesia terdapat di kawasan Timur Indonesia, akan tetapi sejauh ini pemanfaatan masih belum banyak tersentuh oleh kegiatan pembangunan mengingat seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala, baik berupa kendala fisik, sosial maupun ekonomi. Selain itu pemanfaatannya dilaksanakan dalam bentuk perusahaan besar dan oleh masyarakat nelayan tradisional yang hidup secara subsisten dan mempunyai adat kelembagaan setempat.

Hal ini menunjukkan adanya semacam sifat dua lisme baik menyangkut jumlah nelayan, bentuk dan skala usaha, teknologi yang digunakan, tingkat intensitas modal, tenaga kerja maupun sistem kepemilikannya.

Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan tidak terlepas dari sifat sumberdaya tersebut yang mempunyai ciri, sebagai *common property resource* yang tidak mengenal batas hak-hak wewenang individual bagi yang memanfaatkannya. Oleh karena sifatnya itulah maka pemanfaatan sumberdaya ini mengarah pada terjadinya misalokasi sumberdaya dan mengarah pada pengurusan kekayaan alam tersebut. Hal ini disebabkan setiap perusahaan atau individu nelayan berkeinginan untuk memaksimalkan nilai tangkapannya, tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Hal yang hampir sama juga terjadi dalam pemanfaatan sumber daya lahan meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.

### III. Diversifikasi Pertanian

Dalam literatur pembangunan pertanian, diversifikasi pada umumnya dihubungkan dengan suatu peralihan atau perpindahan dari komoditas ekspor utama ke arah pengusahaan komoditas baru atau tambahan yang dipandang sebagai jalan keluar dalam menghadapi permintaan pasar. Definisi yang lain mengatakan diversifikasi pertanian sebagai suatu pemilihan dan adopsi dari beberapa tambahan tipe komoditas yang berorientasi pasar, untuk dihasilkan melalui budidaya pertanian secara modern, pada tingkat nasional atau regional.

Diversifikasi pertanian adalah upaya-upaya mengembangkan atau menganekaragaman aneka usahatani (mengusahakan beberapa jenis usahatani serta mengembangkan produksi pokok menjadi beberapa produk baru). Jadi diversifikasi meliputi dua macam yaitu: (1) diversifikasi horizontal, pengembangan aneka usahatani atau beberapa jenis cabang usahatani, dan (2) diversifikasi vertikal yang merupakan upaya pengembangan produksi pokok menjadi beberapa produk baru.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dirangkum suatu pengertian diversifikasi pertanian sebagai suatu usaha yang kompleks dan luas untuk meningkatkan perekonomian pertanian melalui upaya penganekaragaman komoditas pada subsistem produksi, konsumsi dan distribusi baik pada tingkat usaha tani regional maupun nasional menuju tercapainya transformasi struktural sektor pertanian ke arah pertanian tangguh.

Diversifikasi di sektor pertanian mempunyai beberapa dampak positif. Diversifikasi horisontal yang merupakan diversifikasi di tingkat usahatani, dituntut adanya kebebasan petani untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada. Diversifikasi vertikal terutama dimaksudkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil dan peningkatan mutu produk. Dalam diversifikasi ini dituntut adanya keterkaitan satu kegiatan dengan kegiatan lain di tingkat petani maupun di tingkat kelembagaan. Sedangkan diversifikasi regional perlu didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif.

Program peningkatan produksi melalui diversifikasi di sektor pertanian sebagian besar harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani produsen sehingga tercapai adanya pembangunan sektor pertanian yang berkesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan ditandai adanya kelangsungan produksi yang memberikan keuntungan bagi petani dan adanya kebebasan bagi mereka untuk menentukan pilihan terbaik dalam berusaha tani. Pembangunan yang berkesinambungan diharapkan terjadi dengan mengikutsertakan sebagian besar pelaku ekonomi dalam menghasilkan, menikmati hasil, dan melestarikan hasil.

Peningkatan produksi pertanian seyogyanya memperhatikan petani yaitu peningkatan produksi yang dapat memberikan jaminan pendapat dari usaha taninya. Meningkatnya pendapatan petani diharapkan dapat menciptakan surplus yang dapat diinvestasikan untuk meningkatkan daya beli petani khususnya pada produk lain yang tidak dihasilkan sendiri oleh petani. Meningkatnya jumlah produk yang diminta berarti meningkatkan kaitan sektor pertanian dengan sektor lain. Dengan demikian kebijaksanaan yang diarahkan pada meningkatnya taraf hidup petani harus berorientasi pada produsen.

Dalam kebanyakan negara di Asia, termasuk Indonesia, upaya reorganisasi sumberdaya untuk mengatasi resiko ketidakstabilan harga dan produk dilakukan dengan cara diversifikasi. Strategi diversifikasi pertanian ini dapat diartikan lebih luas lagi, antara lain meliputi aspek: (1) spesialisasi komoditi regional; (2) meningkatkan perdagangan pertanian internasional, dan (3) mengalihkan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor lain tanpa harus menimbulkan penurunan produksi pertanian.



Apabila ketiga aspek tersebut dipertimbangkan dalam strategi diversifikasi, maka strategi itu perlu dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu pada (1) tingkatan usaha tani, (2) tingkatan sektoral, (3) tingkatan regional dan nasional.

Di tingkat usahatani, diversifikasi lebih ditekankan untuk menghindari faktor resiko, gangguan, dan ketidakpastian, baik terhadap produksi maupun harga, dan memaksimalkan penggunaan sumberdaya sehingga pada akhirnya pendapatan petani produsen dapat ditingkatkan. Diversifikasi di tingkat usahatani juga diartikan sebagai penganekaragaman produksi dalam satu sistem usahatani dengan tujuan mendayagunakan sumberdaya alam dan sumberdaya petani untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Di samping mendayagunakan secara optimal sumberdaya yang ada, upaya ini mengurangi ketergantungan petani terhadap satu macam produk atau tanaman, yang pada gilirannya mengurangi resiko kegagalan panen.

Di tingkat sektoral, perlu ada semacam usahatani terpadu yang pada tingkat ini bukan saja satu macam cabang usahatani yang dikembangkan tetapi mencakup berbagai usaha pertanian serta melihat keterkaitannya. Sedangkan spesialisasi komoditas di tiap daerah menjadi penting untuk menjamin penyediaan bahan baku berlanjut. Di tingkat regional dan nasional. Berupa penganekaragaman yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk pertanian yang disesuaikan dengan keadaan iklim, agronomis, daya dukung masyarakat dan daerah setempat. Diversifikasi dalam perekonomian secara keseluruhan menjadi suatu keharusan karena perubahan perdagangan pertanian internasional ataupun pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain akan mempengaruhi terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan.

Seperti dijelaskan terdahulu, konsep skala usaha maupun diversifikasi sama-sama mendasarkan diri pada konsep efisiensi. Apabila pengertian diversifikasi pertanian diartikan lebih luas lagi, maka peranan skala ekonomi dalam merangsang diversifikasi, paling tidak dapat dilihat dari empat aspek sebagai berikut:

#### 1. Aspek Skala Ekonomi

Skala ekonomi bagi perusahaan pertanian di Indonesia sudah dikenal sejak lama; antara perusahaan besar yang biasanya di subsektor perkebunan dan perusahaan kecil di subsektor pertanian rakyat.

Pola PIR diperkenalkan untuk menghilangkan kesenjangan di antara dua macam perusahaan tersebut yang, secara vertikal untuk maksud memacu pertumbuhan ekonomi dan secara horizontal untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antar petani plasma, antara petani dan perusahaan serta antara perusahaan dan Departemen teknis yang terkait, perludikembangkan sedemikian rupa agar bentuk mitra usaha demikian dapat berjalan dengan baik. Perusahaan besar yang mempunyai teknologi dan manajemen modern perlu membagi pengalamannya dengan perusahaan kecil atau petani plasma dan sebaliknya, perusahaan kecil dan petani plasma perlu belajar banyak bagaimana menerapkan teknologi dan manajemen modern yang mereka peroleh dari perusahaan besar tersebut dalam usaha taninya. Di sisi lain, perusahaan besar perlu terus dirangsang untuk berproduksi dengan tujuan ekspor, sementara itu perusahaan kecil dan petani plasma dirangsang untuk ikut menyediakan bahan baku yang cukup dan berlanjut.

## 2. Aspek Efisiensi dan Keterpaduan

Keterpaduan dan efisiensi dalam pembangunan pertanian sangat perludiperhatikan. Pada luasan lahan pertanian yang sempit diperlukan konsolidasi lahan. Dengan kelompok hamparan yang lebih luas dan didukung oleh agroklimat yang memadai, maka efisiensi usahatani akan relatif lebih mudah dicapai. Selain keterpaduan dalam reorganisasi sumberdaya pada komoditas tertentu, maka di daerah-daerah dengan spesifikasi lahan yang khas perlu dikembangkan keterpaduan dalam berbagai cabang usahatani yang dilakukan. Dengan alokasi sumberdaya yang lebih baik efisiensi usahatani akan relatif lebih mudah dicapai. Keterpaduan antar berbagai cabang usahatani dapat dilaksanakan dalam skala kecil maupun skala besar tergantung dari situasi dan kondisi setempat. Karena kebanyakan petani kita mempunyai luasan lahan yang sempit, apabilasistem pengelompokan hamparan tidak memungkinkan maka optimasi melalui keterpaduan usahatani pada lahan yang relatif tidak luas juga dapat dianjurkan. Selanjutnya keterpaduan wilayah dalam skala usaha yang relatif lebih luas akan lebih efisien lagiapabila disertaidengan konsolidasi lahan yang didasarkan bukan saja pada tata guna tanah tetapi juga pada kesesuaian lahan. Dengan demikian tujuan diversifikasi vertikal maupun horizontal akan dapat dicapai dengan relatif mudah.

### 3. Aspek Teknologi

Teknologi dalam usaha pertanian selalu berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya varietas padi selalu berganti disesuaikan dengan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, selera, atau rasa. Pada situasi tenaga kerja pertanian yang berlebihan maka teknologi yang dianjurkan adalah teknologi padat tenaga kerja. Sementara itu teknologi baru untuk pertanian lahan kering perlu dikembangkan karena di lahan tersebut dapat dikembangkan berbagai alternatif usaha yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan di lahan sawah. Selanjutnya teknologi untuk komoditas yang mempunyai elastisitas permintaan tinggi dan mempunyai prospek ekspor juga perlu dikembangkan, karena perubahan yang sedikit saja pada permintaan dan penawaran pada komoditas tersebut akan berpengaruh pada pendapatan petani produsen.

Dalam kaitannya dengan skala ekonomi, maka perlu ada segmentasi kerja yaitu kegiatan yang memerlukan teknologi padat modal dapat dikerjakan oleh perusahaan besar seperti kegiatan transfer teknologi, pengolahan dan pemasaran. Sebaliknya kegiatan yang menggunakan teknologi yang tidak padat modal dapat diserahkan pada perusahaan kecil atau petani. Dengan demikian ada pembagian tugas yang relatif jelas antara perusahaan besar dan kecil atau petani yang para akhirnya diharapkan keduanya dapat merasakan hasil usahanya secara proporsional.

### 4. Aspek Perwilayahan Komoditas

Di samping aspek skala ekonomi, efisiensi dan keterpaduan serta teknologi, mungkin sudah waktunya menerapkan program diversifikasi komoditi tertentu di wilayah yang juga tertentu yang dianggap potensial untuk pengembangan komoditas tersebut berikut pengolahan hasilnya. Selanjutnya sarana pendukung sampai dengan tujuan ekspor, perlu disediakan sehingga baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan petani yang bekerja sama dengan perusahaan besar tersebut dapat berkonsentrasi untuk beberapa komoditas saja yang mereka lakukan secara profesional. Dengan cara demikian, persaingan mencari lahan untuk pengembangan berbagai komoditas dapat dihindarkan dan kebijaksanaan harga *input* ataupun *output* dapat diberlakukan menurut kepentingan di masing-masing wilayah.



#### IV. Desentralisasi

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara berkembang.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi pada Negara sedang berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi dan budaya seperti : (1) sampai seberapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung-jawab, (2) sampai seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan, (3) kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan, dan (4) sampai seberapa jauh tersedia sumberdaya keuangan, manusia dan prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung-jawab. Keempat faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Salah satu asas pelaksanaan pembangunan yang disebut dalam UU No. 5 tahun 1974 adalah adanya desentralisasi. Artinya, diberikannya kewenangan dan tanggung jawab kepada badan atau organ di daerah untuk melaksanakan pembangunan. Wujudnya adalah diberikannya otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayakannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Namun seperti diketahui bahwa meskipun sudah ada otonomi Daerah, pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program pembangunan regional (sebagai manifestasi asas desentralisasi) tetapi juga berasal dari program sektoral (sebagai perwujudan dari asas dekonsentrasi). Dua jenis asas ini memang secara bersama-sama dijalankan oleh Pemerintah dengan tujuan menjembatani disparitas kemajuan pembangunan antar daerah.

Akan tetapi sampai saat ini, Program pembangunan sektoral masih tetap mendominasi program-program pembangunan di daerah. Karena pembangunan sektoral ini merupakan program Departemen teknis yang ada di seluruh wilayah Indonesia, maka perencanaannya lebih ditentukan oleh Pemerintah Pusat dibandingkan dengan kepentingan Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam pembiayaan pelaksanaan proyeknya.

Dari segi model perencanaan pelaksanaan program regional dengan asas desentralisasi sering disebut sebagai model perencanaan yang bersifat *Bottom up*. Sistem perencanaan ini dianggap lebih mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah, karena para perencanaannya (yang ada di daerah) dianggap lebih tahu persoalan di daerah dan masyarakatnya. Model ini dianggap ideal untuk pembangunan daerah, meskipun diakui sangat sulit untuk bisa melakukan asas desentralisasi sepenuhnya. Keterbatasan dana atau rendahnya kualitas perencana Daerah merupakan kendala yang menghambat terlaksananya desentralisasi.

Seperti diketahui, umumnya pada setiap manajemen, semakin jauh pelaksanaan aktivitas dari pengawasan pimpinan pusat, semakin terbuka kemungkinan distorsi antara pelaksanaan dengan rencana. Distorsi ini bisa muncul karena semakin jauhnya kemampuan manajemen untuk melakukan kontrol dan ketidakmampuan pelaksanaan program di lapangan.

#### **V. Reorientasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Rakyat**

Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan perekonomian Indonesia seyogyanya harus mengindahkan asas keunggulan komparatif. Strategi ini sangat relevan bagi pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal pengembangan pembangunan pertanian regional. Namun demikian, dalam pelaksanaannya upaya regionalisasi komoditas pertanian ini sebaiknya dikaitkan dengan kebijakan pengembangan industri pertanian (*agro industry*). Ada beberapa hal yang melandasi pemikiran ini, antara lain:

- (a). mengurangi resiko atau ketidak-tentuan (*uncertainty*) pertanian.
- (a). Memperpendek jalur kelembagaan pasca panen. Dengan cara ini diharapkan petani dapat menikmati nilai tambah yang lebih besar.
- (c). Memperpendek jarak transportasi, sehingga biaya angkutan bahan baku bisa ditekan sekecil-kecilnya.

(d). Menimbulkan pengaruh ganda (*multiplier effect*) baik tenaga kerja maupun pendapatan yang bisa dinikmati oleh petani.

Yang dimaksud dengan reorientasi (*redirection*) program pembangunan disini adalah pembangunan yang berdasarkan orientasi pasar dan prinsip keunggulan komparatif yaitu dari menitikberatkan pada suatu sektor perubahan tertentu dengan campur tangan pemerintah secara intensif menuju ke arah diversifikasi berdasarkan orientasi pasar dan keunggulan komparatif, dimana masyarakat, pengusaha lokal, dan pemerintah daerah mempunyai peranan lebih menonjol.

Seperti diuraikan sebelumnya, karakteristik masyarakat dan keragaman spasial sumberdaya alam sangat kompleks, sementara itu berbagai perubahan terjadi sangat cepat. Model pembangunan yang sentralistik tidak cocok dengan karakteristik masyarakat dan sumberdaya yang kompleks dengan perubahan yang cepat tersebut, disamping biaya manajemen yang tinggi. Artinya dengan heterogenitas yang tinggi tersebut, maka model yang sentralistik kurang sesuai karena tidak efisien dan tidak mampu untuk memahami aspirasi setempat. Oleh sebab itu, model pembangunan seyogianya disusun atau dibuat berdasarkan atas satuan-satuan (*region*) yang relatif homogen.

Sebagaimana telah diketahui, kegiatan agraris dan maritim merupakan sumber pendapatan dari bagian terbesar masyarakat. Pemikiran ekonomi rakyat muncul didasari oleh proses induktif adanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi itu dapat terlihat dari data makro maupun kondisi riil masyarakat di lapangan. Berdasarkan dua hal tersebut, maka ekonomi agraris dan maritim perlu ditingkatkan dengan pengembangan kebijaksanaan ekonomi rakyat sebagai berikut:

- 1). tercapainya alokasi pemikiran sumberdaya yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat lapisan bawah,
- 2). tercapainya peningkatan potensi produktif dan peningkatan posisi rebut-tawar masyarakat yang berada pada lapisan bawah perekonomian,
- 3). masyarakat yang berada pada lapisan bawah perekonomian mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri dalam mengembangkan perekonomiannya berdasarkan sistem nilai yang dianut,
- 4). sumber daya yang dimiliki masyarakat lapisan bawah ekonomi harus mendapat kaitan yang kuat dengan pengembangan ekonomi nasional

Dari keempat hal di atas, strategi yang dipandang tepat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut:

- 1). strategi yang dipilih (dirumuskan) harus bersifat langsung pada pokok permasalahan yang dihadapi dan secara nyata dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun masalah yang dihadapi "Usaha Kecil" berbeda, namun secara umum masalah utamanya adalah: a). permodalan, b) pemasaran, c) tenaga kerja/tenaga ahli, d) teknologi, dan e) manajemen/organisasi,
- 2). karena kesenjangan yang terjadi pada umumnya bersifat struktural maka pilihan strategi pemerintah tidak cukup hanya bersifat netral, tetapi secara tegas mendukung pengembangan ekonomi rakyat, melalui pembatasan integrasi vertikal bagi komoditas yang berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat,
- 3). kapabilitas rakyat untuk melaksanakan adaptasi dan inovasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan ekonomi dan sosial dihargai sehingga kecepatan pembangunan ekonomi perlu disesuaikan,
- 4). meskipun demikian strategi yang dipilih tetap perlu berpijak pada ekonomi positif yang menuntut adanya pemanfaatan secara efisien dari sumberdaya langka,
- 5). kebijaksanaan yang berkaitan dengan dunia usaha haruslah dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya domestik yang mengarah pada jatuhnya nilai tambah yang lebih besar pada masyarakat yang berada pada posisi rendah dalam perekonomian,
- 6). sebagai langkah awal dari penerapan ekonomi rakyat adalah perumusan kebijakan (*policy*) baru yang sesuai bagi pemecahan masalah parsial. Dalam jangka panjang, kebijaksanaan yang lebih bersifat parsial ini perlu disertai kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan,
- 7). aspek-aspek pendukung di atas harus ditetapkan dengan sengaja (*by choice*) oleh pemerintah, karena penyediannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar,

#### VI. Penutup.

Kaitan antara proses diversifikasi dan desentralisasi dengan ekonomi agraris dan maritim dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat memang cukup luas, multi dimensi dan kompleks. Kaitan ini dapat dipandang dari berbagai aspek walaupun tujuan akhirnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan mensukseskan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Agar strategi diversifikasi secara vertikal maupun horisontal dan desentralisasi mampu meningkatkan ekonomi agraris dan maritim melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan serta memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, perlu dilakukan kajian-kajian yang spesifik menurut daerahnya agar pengaruh keragaman sumber daya alam, manusia, dan modal dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk hal ini, peningkatan peranan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan.

ooo000ooo

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allan M Mohrman, 1989 : "Large - Scale Organizational Change",  
Allan M. Mohrman, Gerald E. Ledford Jr, Thomas G. Cummings  
Edward E. Lawler III, and Associates : Jossey-Bass Inc.  
Publisher 350 Sansome Street San Fransisco, California 94104.
- Boseman, F. Gleen, 1989: "Strategic Management": Text and Cases,  
F. Gleen Boseman, Arvind Phatak ; John Willey & Sons, Inc New  
York.
- Myrdal, G., 1997. In Rich Land and Poor. Harper and Brother Publisher  
New York.
- Perraoux, F., 1977. Note On The Concept of Growth Poles, In David  
Lee, Mc Kee, et.al., Regional Economics: Theory and Practice,  
Free Press. New York.
- Scott, James C., 1976 : "The Moral Economy of The Peasant", New  
Haven and London, Jale University Press.
- Jasni, Z, 1981: "Bung Hatta,s Answers "Gunung Agung, Jakarta -  
Indonesia.

ooo000ooo